

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan daerah, wewenang otonomi daerah sangat diprioritaskan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sleman merupakan salah satu Pemda yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat terus dilakukan pemerintah daerah dengan PP No 8 tahun 2006, peraturan pemerintah ini tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yaitu prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Beberapa pihak kerap berpandangan negatif terhadap pemerintah, contohnya sebagai pemborosan dana, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah hukum seperti korupsi, keuangan daerah harus dimanfaatkan seefisien mungkin, dan setiap aparatur pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah (Lestari dan MutoriQH, 2020). Serupa dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi pada sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Kendal dan merugikan keuangan negara ([delikjateng.com](http://delikjateng.com)) serta Tuntutan terhadap pengelolaan keuangan publik (*public money*). Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengelolaan dana publik jika ingin mencapai tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), Kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel merupakan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Kinerja dalam pemerintah daerah mengacu pada segala sesuatu yang organisasi telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk pencapaian atau hasil dalam mengelola dan menjalankan organisasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sangat penting dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah maupun kinerja periode sebelumnya sehingga dapat menjadi landasan bagi strategi pemerintah periode berikutnya.

Penilaian kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga hal, yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan

pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Mardiasmo (2009). Kinerja pemerintah daerah memerlukan beberapa faktor yang dapat berpengaruh positif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Beberapa penelitian yang telah diuji diantaranya penelitian Yang & Suartana (2017) menunjukkan bahwa mempunyai hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem pengendalian internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian lain oleh Lestari & Mutoriogh (2020) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan organisasi pemerintah adalah dari perspektif manajemen keuangannya. Pemerintah dapat terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan kepastian keberhasilan atau penetapan suatu kegiatan dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Ruspina (2013). Menurut Halim dan Damayanti (2007) Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Laporan Realisasi APBD yang terdiri dari tiga bagian utama dapat digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan, penggunaan dan pembiayaan Fidelius (2013). Penelitian oleh Sarmigi dan Maryanto (2020) menguji tentang pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Khairi & Meiranto (2021) yang menguji variabel tersebut pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah *good governance*. Agoes (2011) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Suatu sistem tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pemegang saham, peran Direksi, dan peran Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya. Metode yang transparan untuk menetapkan, mencapai, dan menilai kinerja, agar tujuan pemerintah juga disebut sebagai pemerintahan yang baik.

Beberapa Penelitian yang telah dilakukan oleh Claraini (2017), Indriana Nasrum (2019), Gustianra dan Serly (2019), dan Sarmigi dan Maryanto (2020) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011:319.2) adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen, dewan komisaris, dan entitas lain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas laporan keuangan, operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

(Suseno, 2009) menyatakan Seluruh proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas pengawasan lainnya dalam organisasi dapat diselesaikan dengan bantuan pengendalian internal, yang memberikan jaminan yang memadai bahwa aktivitas telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan kepemimpinan dalam mewujudkan sistem pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan Mattoasi, *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorotalo. Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah membangun dan menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih efisien. Penelitian ini selaras dengan penelitian Yang & Suartana (2017) yang menguji variabel tersebut pada Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) Kota Bima

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Gaya Kepemimpinan. Menurut Pasolong (2013) Gaya kepemimpinan adalah strategi yang dia gunakan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya secara efektif dan efisien. Evaluasi kinerja organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan gaya kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomatunnisa (2017) mendefinisikan bahwa peran pemimpin berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pada instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian Handoko dan Ari (2015) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yang & Suartana, (2017) yang meneliti tentang pengaruh *good governance*, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pada kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pengelolaan keuangan daerah, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dan menambah gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada BPK pada tanggal 10 Januari 2022 lalu. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2021, termasuk bagaimana implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan.

LKPD Kabupaten Sleman tahun 2021 menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-11 kalinya. Hal tersebut

menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD serta manajemen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Walaupun menerima Opini WTP, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih memiliki beberapa kelemahan. BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah belum memadai, pengurusan izin reklame belum tertib, dan pengelolaan aset belum tertib. Salah satu fokus pemeriksaan BPK di seluruh entitas Kota dan Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah pengurusan izin reklame dan piutang daerah, yaitu dua isu tematik. Pemerintah kabupaten Sleman telah menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebanyak 878 dari 950 rekomendasi, atau 92,42% rekomendasi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 81,60 %, persentase ini naik menjadi 10,82%.

Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, pencapaian tujuan mewujudkan *good governance* merupakan hal yang fundamental. Menurut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2006, kegiatan dipusatkan pada pemberian landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan *good governance* dengan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan budaya tertib hukum, penguatan kelembagaan, efisiensi dan efektivitas pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan pelayanan masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam rangka

menjalankan misi menjaga terselenggaranya *good governance*. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang terbuka dan publikasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik telah memulai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Penelitian ini menggunakan gaya kepemimpinan sebagai pemoderasi, penambahan variabel gaya kepemimpinan dikarenakan terdapat inkonsistensi hasil pada setiap variabel independen yang diteliti. Salah satu faktor lingkungan internal organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perumusan kebijakan dan strategi organisasi yaitu gaya kepemimpinan. Salah satu alasan untuk selalu menyelidiki kompleksitas kepemimpinan yaitu peran pemimpin sangat strategis untuk pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Diharapkan dengan adanya gaya kepemimpinan mampu memberikan dampak positif terhadap tujuan organisasi.

Sifat seorang pemimpin seringkali dianggap sebagai pertimbangan utama atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi (Robbins, 2002). Keberhasilan kinerja pemerintahan daerah tidak terlepas dari peran seorang pemimpin, dengan kriteria pemimpin yang memiliki sikap tegas dan mampu memberikan contoh pada bawahannya dalam melaksanakan tugas, maka tujuan dari kinerja pemerintah tersebut akan tercapai. Faktor gaya kepemimpinan menjadi sangat penting karena peran pemimpin pada suatu organisasi atau pemerintah daerah dapat menunjukkan karakter kerjanya (Embrianto *et al.*, 2016). Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu



mengembangkan gaya kepemimpinannya yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya. Sektor publik yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik, memiliki lingkungan kerja yang baik sehingga pengelolaan keuangan daerahnya akan baik pula. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya.

Dalam konteks penelitian ini, dengan subjek penelitian Pemerintah Daerah. Gaya Kepemimpinan memiliki peran yang penting bagi peningkatan organisasi yang tinggi, cenderung akan memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan optimal, dapat berkontribusi pada kinerja pemerintah daerah, memiliki tata kelola yang baik, memiliki sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang tinggi. Tetapi Apabila pemerintah daerah sudah memiliki kinerja yang maksimal, namun tidak diimbangi dengan gaya kepemimpinan yang tinggi belum tentu pemerintah daerah ini akan melaksanakan kinerja sebagaimana ketentuan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian sebelumnya, penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi penting dilakukan. Penelitian ini berfokus pada kinerja pemerintah daerah dengan variabel yang diteliti yaitu pengelolaan keuangan daerah, *good government*, sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah**

## **Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sleman)”**

### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Supaya penelitian dapat memberikan pemahaman sesuai yang diharapkan maka peneliti hanya mengambil data dari SKPD yang berada di Kabupaten Sleman. Batasan terhadap variabel yang digunakan mencakup 5 variabel yaitu pengelolaan keuangan daerah, *good governance*, sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan dan kinerja pemerintahan daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah *good governance* daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh positif pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh positif *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah?

6. Apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
4. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
5. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh *good governance* daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.
6. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah, *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah dengan gaya kepemimpinan sebagai pemoderasi. peran pemimpin penting karena salah satu faktor lingkungan internal yang berpengaruh signifikan terhadap perumusan kebijakan dan strategi organisasi adalah gaya kepemimpinan. Apabila pemimpin yang memiliki sikap tegas dan mampu memberikan contoh pada bawahannya dalam melaksanakan tugas, maka tujuan dari kinerja pemerintah daerah akan tercapai.

### **B. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya pada pengelolaan keuangan keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor meliputi pengelolaan keuangan daerah, *good governance*, sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerahnya. Upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan *good governance* sebagai tata kelola dan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses untuk mencapai kinerja pemerintah yang diinginkan, dan dengan gaya kepemimpinan yang berperan sangat penting bagi pencapaian misi visi dan tujuan suatu

pemerintah daerah. Maka dengan melakukan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mendorong instansi terkait dalam membuat kebijakan ataupun upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.